

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dan keterangan yang telah dijabarkan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kesetaraan Para Pemangku Kepentingan Dari Unsur Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam Penetapan dan Penyusunan RKPD

Bappeda membentuk tim penyusun RKPD yang memiliki kompetensi dalam hal pembangunan dan keuangan. Diperlukan kehati-hatian dan ketelitian dalam penyusunan karena menyangkut hajat hidup masyarakat Kota Metro. Tim penyusun RKPD terdiri dari Bappeda dan SKPD yang terkait. Keterlibatan unsur non pemerintah dalam penyusunan RKPD tercermin dalam kehadiran unsur non pemerintah dalam musrenbang kecamatan Metro Pusat mulai dari LSM dan tokoh masyarakat/pemuda.

2. Keterwakilan Kaum Perempuan dan Kelompok Marjinal Pada Musrenbang Kecamatan

Kehadiran kelompok marjinal dan kaum perempuan dalam musrenbang kecamatan metro pusat telah terwakil dengan dihadirinya 10 orang

perempuan. Perwakilan kehadiran perempuan tidak terlibat secara aktif dalam diskusi musrenbang dan pengambilan keputusan musrenbang.

## 2. Persiapan Musrenbang

Dalam persiapan penyelenggaraan musrenbang Kecamatan Metro Pusat Camat telah membentuk tim penyelenggara yang menyiapkan informasi yang dibutuhkan peserta musrenbang baik dari informasi isu-isu perencanaan kecamatan dan usulan-usulan prioritas utama serta proses koordinasi dengan tim perencana Kelurahan untuk menyelesaikan usulan program yang sebelumnya diselenggarakan dalam musrenbang masing-masing Kelurahan.

## 3. Pelaksanaan Musrenbang

Didalam pelaksanaan musrenbang kecamatan Metro Pusat ketersediaan tempat penyelenggaraan dan alokasi waktu penyelenggaraan telah sesuai dengan ketentuan oleh pemerintah daerah. Informasi yang disampaikan oleh narasumber juga mendapat dukungan penuh dari masyarakat, terlebih lagi usulan masyarakat direspon oleh pemerintah daerah, hanya saja alokasi waktu pembahasan musrenbang masih sangat minim sehingga masih banyak usulan masyarakat yang tidak dapat tersampaikan dengan baik. Usulan yang diprioritaskan belum disertain dengan perkiraan anggaran baik dari APBD maupun non APBD,

Didalam pelaksanaan musrenbang Kecamatan Metro Pusat ketersediaan format prioritas untuk menentukan skala prioritas usulan dari masing-

masing peserta cukup memadai sehingga memudahkan seluruh peserta untuk menemukan kata sepakat atas usulan-usulan yang diajukan. Sedangkan didalam Penyelenggaraan musrenbang juga telah mampu meningkatkan animo seluruh *stakeholder* untuk ikut urun rembug bersama, Hanya saja animo masyarakat yang datang masih didominasi oleh golongan pria dan sedikit perwakilan perempuan serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) terlebih lagi tidak hadirnya kalangan legislatif.

Didalam agenda yang dilaksanakan pada saat musrenbang telah berjalan dengan efektif dan sesuai dengan rencana tim penyelenggara. Agenda yang direncanakan berupa pembagian kelompok pembahasan sesuai dengan masing-masing permasalahan, agenda tersebut menghasilkan rancangan akhir berupa skala prioritas kecamatan. Hanya saja didalam pembahasan tersebut masih terlihat sebagian masyarakat yang tidak terlibat dalam menentukan skala prioritas, hal tersebut terindikasi akibat masih lemahnya pengetahuan masyarakat untuk menjunjung tinggi prinsip penyelenggaraan musrenbang. Dilain sisi fasilitator belum optimal dalam menentukan tujuan serta sasaran pertemuan, karena ketika sidang kelompok banyak usulan peserta kurang didengar, terlebih lagi seluruh fasilitator tidak ada wakil perempuan.

Dari sisi data pendukung tim penyelenggara telah mampu menyiapkan fasilitas bantu untuk peserta baik berupa alat tulis menulis hingga kertas

usulan, alat bantu yang disiapkan sedikit banyak memudahkan peserta dalam membahas usulan program/kegiatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, ada beberapa saran untuk dapat lebih mengefektifkan musrenbang sebagai media perencanaan pembangunan dalam mewujudkan tercapainya tujuan dari musrenbang,

1. keterlibatan unsur non pemerintah dalam musrenbang kecamatan metro pusat seharusnya dapat ditingkatkan melihat jumlah perwakilan yang hanya sedikit yaitu kurang dari setengah peserta musrenbang yang hadir pada pelaksanaan musrenbang kecamatan tersebut..
2. kehadiran kelompok perempuan dan kaum marjinal dalam musrenbang kecamatan belum mewakili aspirasi kaum perempuan. Ketidakaktifan kaum perempuan dalam diskusi menjadi penghambat. Dorongan dari pemerintah dan kesadaran dari kaum perempuan diperlukan untuk peningkatan keterlibatan dan keaktifan perempuan dalam musrenbang, serta diperlukannya suatu kebijakan yang mengatur keterlibatan kehadiran perempuan dalam musrenbang.
3. pemerintah Daerah Kota Metro harus lebih transparan terhadap anggaran perencanaan baik dari anggaran APBD maupun non APBD, transparansi dapat dilakukan dengan mempublikasikannya terhadap publik. Salah satu media penyampaian dapat dilakukan di dalam musrenbang Kelurahan/kecamatan. Pemerintah daerah juga harus dapat lebih

mengoptimalkan anggaran dana tersebut demi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

3. Setiap proses pelaksanaan musrenbang kecamatan Metro Pusat harus dilalui dengan berpegangan pada prinsip demokrasi dan etika. Oleh sebab itu seluruh *stakeholder* harus dapat memenuhi prinsi-prinsip penyelenggaraan musrenbang berupa prinsip kesetaraan, prinsip musyawarah dialogis, prinsip keberpihakan, dan prinsip anti dominasi, sehingga usulan yang disepakati menjadi usulan yang diharapkan semua pihak, dan atas keputusan bersama.
4. Keterlibatan *stakeholder* sangatlah penting guna meningkatkan kualitas hasil dari usulan yang diprioritaskan. Oleh karena itu keterwakilan golongan perempuan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lembaga legislatif harus dapat ditingkatkan. Terlebih lagi lembaga legislatif merupakan mitra pemerintah daerah, sehingga pokok-pokok pikiran mereka akan dapat mengoptimalkan pembahasan.
5. Selain peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap prinsip penyelenggaraan musrenbang juga perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas fasilitator musrenbang. Fasilitator harus dapat menjunjung tinggi prinsip-prinsip musrenbang yaitu prinsip-prinsip kesetaraan, menghargai perbedaan pendapat, keberpihakan terhadap kalangan perempuan, anti dominasi anti diskriminasi, dan lebih mengutamakan kepentingan umum Kelurahan.